

JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS

Vol. 3 No. 2 April 2013

- Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Ekonomi Makro terhadap *Return* Saham Syariah yang Listing di Jakarta Islamic Index
A. Ifayani Haanurat
- Daya Saing dan Kebijakan Ekonomi Internasional Kayu Lapis Indonesia
M. Yusuf S. Barusman
- Analisis Minat Berwirausaha Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lampung Timur
Febrianto
- Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta Dampaknya terhadap Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Lampung
H.M. Achmad Subing
- Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM – MPd) Melalui Proses Pengembangan Kapasitas (Studi di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)
Tukasno
- Analisis Rasio Keuangan untuk Mengevaluasi Tingkat Kesehatan dan Perkembangan Usaha PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kedaton di Bandar Lampung
T o t o n

JURMABIS	Vol. 3	No. 2	Hlm. 115-210	Bandar Lampung April 2013	ISSN 2087-0701
----------	--------	-------	--------------	------------------------------	-------------------



PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG (UBL)

JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS

Vol. 3 No. 2 April 2013

Pembina

Ir. M. Yusuf S. Barusman, M.B.A.
Andala Rama Putra Barusman, S.E., M.A.Ec.

Penanggung Jawab

Dr. Alex Tribuana Sutanto, S.T., M.M.

Ketua Penyunting

Sapmaya Wulan, S.E., M.S.

Penyunting Ahli

Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.S. (Fakultas Ekonomi UNILA)
Dr. Herry Harjanto Hadi, S.E., M.Si. (Fakultas Ekonomi UBL)
Dr. Anna Wulandari, S.E., M.M. (STIE IPWIJA)
Dr. Hanes Riady, M.M., M.B.A. (IBII Jakarta)
Dr. Nur'aeni, M.M. (Fakultas Ekonomi USBRJ)

Penyunting Pelaksana

Ardansyah, S.E., M.M.

Tata Usaha

Olivia Tjioener, S.E., M.M

Penerbit

Universitas Bandar Lampung
Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen

Jurnal Manajemen dan Bisnis terbit 2 kali setahun pada bulan Oktober dan April
Artikel jurnal merupakan artikel hasil penelitian (empiris) dan artikel konseptual yang mencakup kajian bidang Manajemen dan Bisnis.

Alamat Redaksi

Fakultas Ekonomi Universitas Bandar Lampung
Kampus A Jln. Z. A. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979 Fax: 0721-701467 Hp: 0811798834 Email: sapmaya.wulan@ubl.ac.id

JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS

Vol. 3 No. 2 April 2013

DAFTAR ISI

Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Ekonomi Makro terhadap <i>Return Saham Syariah</i> yang Listing di Jakarta Islamic Index A. Ifayani Haanurat	115-134
Daya Saing dan Kebijakan Ekonomi Internasional Kayu Lapis Indonesia M. Yusuf S. Barusman	135-149
Analisis Minat Berwirausaha Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lampung Timur Febrianto	150-159
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta Dampaknya terhadap Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Lampung H. M. Achmad Subing	160-177
Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pedesaan (PNPM-MPd) Melalui Proses Pengembangan Kapasitas (Studi di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur) T u k a s n o	178-197
Analisis Rasio Keuangan untuk Mengevaluasi Tingkat Kesehatan dan Perkembangan Usaha PT. Pegadaian (Peresero) Cabang Kedaton di Bandar Lampung T o t o n	198-210

**EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd) MELALUI
PROSES PENGEMBANGAN KAPASITAS
(Studi di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)**

***EVALUATION OF NATIONAL PROGRAM OF COMMUNITY
EMPOWERMENT (PNPM-MPd) THROUGH
CAPACITYBUILDING PROCESS
(Study in Study in District of Pekalongan East Lampung)***

Tukasno

**Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lampung Timur
Jln. Pramuka, Labuhan Ratu II Way Jepara, Lampung Timur 34196
Telp: 0725-641466, Hp. 081541116805**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi proses pemberdayaan masyarakat pada kegiatan PNPM-MPd di Kecamatan Pekalongan Lampung Timur ditinjau dari aspek pengembangan kapasitas masyarakat dengan sasaran penelitian yaitu mengkaji implementasi pengembangan kapasitas masyarakat, sikap dan cara pandang masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat serta mengkaji derajat keberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan proses pengembangan kapasitas masyarakat dan mengkaji derajat keberdayaan masyarakat, sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk mengukur sikap dan cara pandang masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dalam komunitasnya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemberdayaan dan telah berhasil mengubah tingkat kesadaran masyarakat serta meningkatkan pemahaman untuk berperan dalam pembangunan di komunitasnya. Temuan yang didapat adalah perubahan kesadaran masyarakat tergolong baik/tinggi dengan nilai rata-rata jawaban kuesioner 3,6 dari skala 5 yang berarti masyarakat telah menyadari konsep pemberdayaan dan mengerti untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya. Tanggapan masyarakat terhadap program ini tergolong baik/tinggi dengan nilai rata-rata 3,39 dari skala 5 yang berarti tanggapan masyarakat dimaknai sebagai sikap dan cara pandang masyarakat terhadap pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat melalui PNPM- MPd, namun untuk menuju tahapan pembiasaan masih membutuhkan pembelajaran yang lebih banyak sehingga mereka benar-benar siap untuk bertanggungjawab secara penuh dalam pengelolaan pembangunan komunitasnya.

Kata Kunci: Pengembangan Kapasitas , Pemberdayaan Masyarakat, Sikap dan Cara Pandang Masyarakat

ABSTRACT

The purpose of this study was to evaluate the process of community empowerment in PNPM-MPD in East Lampung District of Pekalongan review of aspects of community development with the goal of research is to study the implementation of community capacity building, community attitudes and perspectives on community development and assess the degree of empowerment of the people. This study uses descriptive qualitative analysis and quantitative descriptive. Qualitative methods are used to get an overview of the implementation of the capacity building process and assess the degree of community empowerment, whereas quantitative methods are used to measure the attitudes and perspectives of the people who carried out the community empowerment in the community. The survey results revealed that community capacity building activities have been carried out in accordance with the principles of empowerment and has managed to change the level of public awareness and increase understanding to play a role in the development of their communities. The findings are classified as either changes in public awareness / high with an average value of 3.6 out of 5 in questionnaire scale which means the public has been aware of the concept of empowerment and be able to use it for the benefit of the community. Public response to the program is quite good / high with an average value of 3.39 means 5 scale community response is defined as the attitudes and perspectives of the community on the implementation of community-based development programs through PNPM MPD, but to get to the stage of habituation still requires more learning so that they are truly ready for the full responsibility in the management of community development.

Keywords: Capacity Development, Community Empowerment, Attitude and Community Perspective

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya menuju ke arah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang disebabkan faktor-faktor tertentu. Untuk menggerakkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, diperlukan dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan peran dan posisinya dalam kerangka membangun

masyarakat madani. Proses penyadaran masyarakat dilakukan melalui konsep pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas masyarakat adalah bentuk dari pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam menjalankan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Apabila masyarakat sebagai pihak yang paling berkepentingan belum memahami makna pengembangan kapasitas dan tidak memberikan tanggapan positif terhadap upaya-upaya pengembangan kapasitas yang dilaksanakan maka bisa dipastikan upaya tersebut tidak akan berdaya guna dan berhasil sesuai tujuan yang ingin dicapai.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) adalah kelanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan (P2KP) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini berupaya menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat (Departemen Pekerjaan Umum, 2008).

Salah satu agenda penting di tingkat masyarakat terkait pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan adalah kegiatan pengembangan kapasitas individu masyarakat. Pada tataran pelaksanaan di masyarakat, kegiatan pengembangan kapasitas tersebut meliputi proses sosialisasi, pelatihan dan pelaksanaan siklus pemberdayaan. Dalam implementasinya ketiga kegiatan tersebut harus berjalan terus dan berkesinambungan karena yang diharapkan dari pemberdayaan adalah pembiasaan masyarakat dan peran serta masyarakat dapat menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Objek penelitian ini adalah Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Kegiatan PNPM-Mandiri Perdesaan di Kecamatan Pekalongan dilaksanakan mulai Tahun 2003 yang saat itu masih bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan di 10 desa yaitu Desa Adirejo, Sidodadi, Gondangrejo, Siraman, Pekalongan, Tulusrejo, Jojog, Gantiwarno, Kalibening, dan Wonosari. Pada Tahun

2006 Program Pengembangan Kecamatan dirubah menjadi Program Nasional Pedesaan Mandiri Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) dan berada dalam satu payung program PNPM Mandiri. Kegiatan siklus PNPM Mandiri bisa dikatakan telah terlaksana semua, karena sampai saat ini telah memasuki siklus tahun kesembilan. Siklus yang telah dilaksanakan dimulai dari sosialisasi awal, perekrutan relawan, pemetaan swadaya, refleksi kemiskinan, pembentukan BKM, penyusunan dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program Penanganan Kemiskinan (PJM Pronangkis), pelatihan-pelatihan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan lapangan.

Kegiatan fisik lingkungan program PNPM-Mandiri Perdesaan baik yang sudah dilaksanakan atau sudah direncanakan adalah pengerasan jalan (*onderlagh*), pengaspalan jalan (*latasir*), pembangunan gorong-gorong dan jembatan, pembuatan saluran drainase, saluran irigasi (*talut*) dan lain-lain. Kegiatan dibidang ekonomi (Usaha Ekonomi Produktif) yaitu pengelolaan dana bergulir untuk kepentingan usaha kecil dan mikro dan untuk kepentingan warga miskin, Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kegiatan dibidang sosial yaitu pendidikan dan Pelatihan Kader Masyarakat (PKM). Kegiatan PNPM-MP yang telah dilaksanakan dapat dilihat dari perkembangan dana bantuan dan perkembangan keuangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dikelola oleh UPK Kecamatan Pekalongan. Gambaran pelaksanaan PNPM-MP berikut Data Bantuan dan Alokasi Penggunaannya Tahun 2003-2011 dapat dilihat pada Tabel 1. Perkembangan Keuangan Simpan Pinjam Perempuan UPK Tahun 2003-2011 pada Tabel 2, dan Perkembangan Keuangan Usaha Ekonomi Produktif UPK Tahun 2003-2011 pada Tabel 3.

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui(Tukasno)

Tabel 1. Data Bantuan PNPM-MP dan Alokasi Penggunaannya di Kecamatan Pekalongan Tahun 2003-2011 (dalam ribuan)

Thn	Jumlah Bantuan	A l o k a s i					Ket.
		UEP	SPP	Fisik	Pndidikan	PKM	
2003	1.000.000	-	94.500	842.520	12.980	41.186	Do UPK & TPK 5%
2004	1.000.000	14.300	92.500	802.014	-	-	Do UPK & TPK 5%
2005	1.000.000	-	89.500	860.500	-	-	Do UPK & TPK 5%
2006	-	-	-	-	-	-	-
2007	-	-	-	-	-	-	-
2008	-	-	-	-	-	-	-
2009	900.000	-	213.750	641.250	-	-	Do UPK & TPK 5%
2010	2.250.000	-	529.625	1.607.875	-	-	Do UPK & TPK 5%
2011	2.250.000	-	260.500	1.877.000	-	-	Do UPK & TPK 5%
Juml.	8.400.000	14.300	1.280.375	6.631.159	12.980	41.186	

Tabel 2. Perkembangan Keuangan SPP – UPK Kecamatan Pekalongan Tahun 2003-2011

Thn	Modal Awal	Jasa SPP	Surplus	Esekusi	Modal akhir	Ket
2003	94.500.000	1.057.500	-	-	95.557.500	
2004	92.500.000	14.487.698	-	-	202.545.198	
2005	89.500.000	53.718.500	-	-	341.559.698	
2006	-	81.272.500	-	12.029.000	-	
2007	-	72.845.747	-	30.246.000	453.402.945	
2008	-	83.294.503	-	71.931.000	464.766.448	
2009	213.750.000	147.408.750	114.511.904	13.205.000	812.720.198	
2010	529.625.000	216.055.000	167.193.837	47.000.000	1.511.400.198	
2011	260.500.000	253.308.125	216.834.125	-	2.025.208.323	

Tabel 3. Perkembang Keuangan Usaha Ekonomi Produktif Tahun 2003-2011(dalam ribuan)

Tahun	Modal Awal	Jasa UEP	Modal Akhir
2003	-	-	-
2004	14.300	429	14.729
2005	-	1.716	16.455
2006	-	2.475	18.920
2007	-	2.587	21.507
2008	-	2.512	24.020
2009	-	4.680	28.700
2010	-	4.920	33.620
2011	-	5.175	38.795

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diajukan masalah penelitian sebagai berikut: 1) Kegiatan pengembangan kapasitas merupakan salah satu elemen penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, untuk itu diperlukan satu kajian untuk mengevaluasi tingkat efektivitas dan keberhasilannya, 2) Model pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan hal baru bagi sebagian masyarakat, sehingga perlu untuk dievaluasi, dan 3) Pandangan masyarakat mengenai kegiatan pemberdayaan lebih berorientasi pada hasil/keluaran daripada proses pemberdayaan itu sendiri. Dari masalah tersebut dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana evaluasi pencapaian pemberdayaan masyarakat melalui proses pengembangan kapasitas masyarakat pada kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Pekalongan Lampung Timur? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pencapaian pemberdayaan masyarakat melalui proses pengembangan kapasitas masyarakat pada kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Pekalongan Lampung Timur. Sasaran dari penelitian ini adalah: 1) Mengkaji implementasi pengembangan kapasitas masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat pada kegiatan PNPM-Mandiri Perdesaan, 2) Mengkaji sikap dan cara pandang masyarakat tentang keberlanjutan konsep pembangunan berbasis masyarakat, dan 3) Mengevaluasi pencapaian tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Kerangka Pemikiran

Pemberdayaan Masyarakat. Meskipun tujuan utama yang hendak dicapai dari pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan menciptakan masyarakat sejahtera secara fisik, mental maupun sosial, namun pendekatan yang digunakan dalam pembangunan harus senantiasa mengutamakan proses daripada hasil. Pendekatan proses lebih

memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggungjawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih besar bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya (Soetomo, 2006). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa didapatkan ketika masyarakat tersebut telah mampu membawa dirinya atau memiliki daya untuk ikut terlibat dalam pembangunan, sehingga konsep pembangunan partisipatif harus juga dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat karena dalam pembangunan kadang masyarakat hanya dilibatkan dalam aspek teknis tanpa peran yang lebih luas mengenai pengambilan keputusan.

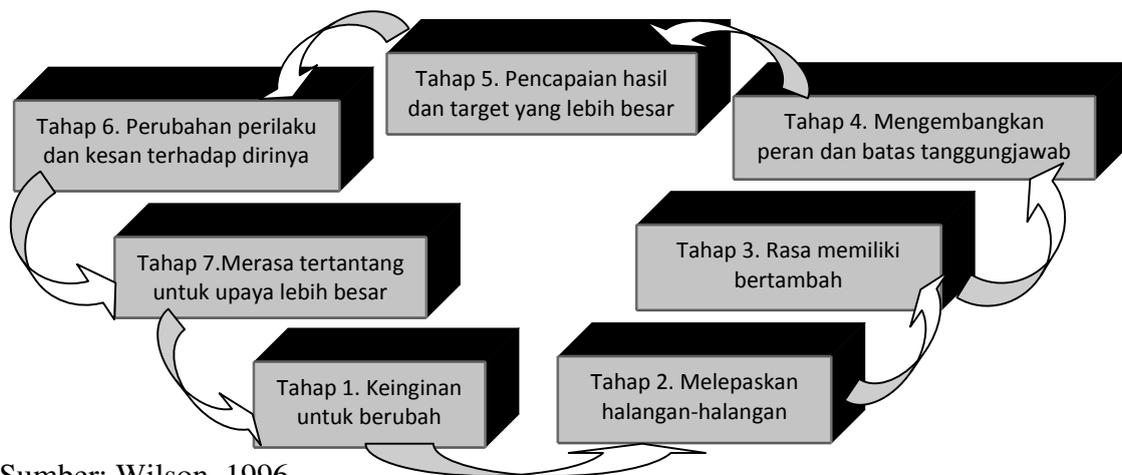
Siklus dan Proses Pemberdayaan Masyarakat. Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya (Foy, 1994). Memberdayakan orang lain pada hakikatnya merupakan perubahan budaya, sehingga pemberdayaan tidak akan jalan jika tidak dilakukan perubahan seluruh budaya organisasi secara mendasar. Perubahan budaya sangat diperlukan untuk mampu mendukung upaya sikap dan praktik bagi pemberdayaan yang lebih efektif (Sumaryadi, 2005: 105). Rubin dalam Sumaryadi (2005: 94-96) mengemukakan 5 prinsip dasar pemberdayaan masyarakat:

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui(Tukasno)

1) Pemberdayaan masyarakat memerlukan *break-even* dalam kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dengan organisasi bisnis, keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan lain. 2) Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. 3) Kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan fisik, 4) Pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya khususnya pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun lainnya, 5) Pemberdayaan harus berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

Wilson (1996) menjelaskan empat tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu tahap penyadaran, tahap pemahaman, tahap pemanfaatan, dan tahap pembiasaan. Pada tahap pembiasaan, diharapkan masyarakat terbiasa terlibat secara aktif dalam pembangunan, karena hasil atau keluaran yang didapatkan adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Program pemberdayaan tidak hanya dilakukan dalam satu siklus dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitas-

nya meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Menurut Wilson (1996) ada 7 tahapan siklus pemberdayaan masyarakat. Tahap pertama, keinginan dari masyarakat untuk berubah menjadi lebih baik. Tahap kedua, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan. Tahap ketiga, masyarakat diharapkan menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan diri dan komunitasnya. Tahap keempat, upaya untuk mengembangkan peran dan tanggungjawab yang lebih luas. Tahap kelima, hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Tahap keenam, terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Tahap ketujuh, masyarakat berhasil memberdayakan diri dan tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah pekerjaan, prestasi dan kepuasan yang lebih baik. (Gambar 1)

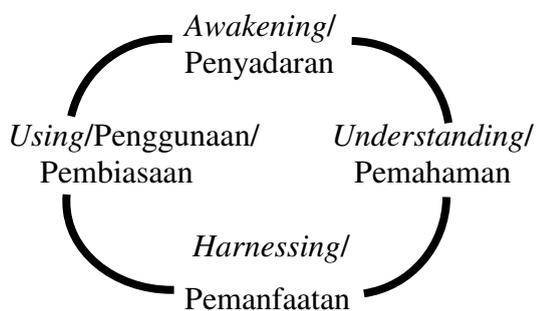


Sumber: Wilson, 1996

Gambar 1. Siklus Pemberdayaan

Proses pemberdayaan dimaknai sebagai runtutan perubahan dalam perkembangan usaha untuk membuat masyarakat menjadi lebih berdaya. Wilson (1996) memaparkan empat tahap proses pemberdayaan yaitu:

1) *Awakening (penyadaran)*, pada tahap ini masyarakat disadarkan akan kemampuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi yang lebih baik dan efektif. 2) *Understanding (pemahaman)*, pada tahap ini masyarakat diberikan pemahaman dan persepsi baru mengenai diri mereka, aspirasi mereka dan keadaan umum lainnya. 3) *Harnessing (memanfaatkan)*, setelah masyarakat sadar dan mengerti mengenai pemberdayaan, saatnya mereka memutuskan untuk menggunakan bagi kepentingan komunitasnya. 4) *Using (menggunakan)* keterampilan dan kemampuan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Gambar 2 menunjukkan proses pemberdayaan masyarakat.



Sumber: Wilson, 1996

Gambar 2. Proses Pemberdayaan

Lingkup dan Tingkatan Pemberdayaan.

Agar dapat melakukan analisis dan pemahaman yang tepat mengenai pemberdayaan, harus dipahami dulu kerangka konseptual mengenai lingkup dan tingkatan pemberdayaan. Dari kajian empiris pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat, Alshop dan Heinshon (2005) menggambarkan 3 hal lingkup pemberdayaan, yaitu pemberdayaan politik, ekonomi dan sosial.

Pemberdayaan politik, upaya menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik dan meningkatkan posisi tawar kepada pemerintah atau pihak lainnya yang meliputi aspek penegakan keadilan, kepemimpinan politik, dan pelayanan publik. *Pemberdayaan ekonomi*, pendekatan kepada masyarakat kelas bawah untuk mampu beraktifitas di bidang ekonomi dan memiliki penghasilan yang lebih baik, sehingga mampu menanggung dampak negatif dari pertumbuhan yang terjadi. *Pemberdayaan sosial*, upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan menyadarkan posisi dan peran seseorang dalam kehidupan sosial dan komunitasnya.

Alshop dan Heinshon (2005) menjabarkan tingkatan pemberdayaan menjadi tiga yaitu: *local level*, *intermediary level*, dan *macro level*. Fujikake (2008) mengemukakan tingkatan pemberdayaan serupa dengan Alshop dan Haeinshon yaitu: *micro level*, *meso level* dan *macro level*. Tingkatan *micro* atau lokal meliputi wilayah lingkungan masyarakat pada tataran desa atau sekitar tempat tinggal. Tingkatan *meso* atau *intermediary* meliputi wilayah kota, jaringan atau hubungan antar organisasi dan pihak eksternal lain. Tingkatan *macro*, wilayah yang lebih luas dari tingkatan sebelumnya, setingkat nasional.

Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut Sumaryadi (2005: 154-158) ada 8 faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat yaitu: 1) Kesiediaan komunitas menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapi, 2) Pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang, 3) Budaya masyarakat yang sudah terbiasa berada dalam hirarki, birokrasi dan kontrol manajemen yang tegas membuat mereka terpola untuk berpikir dan berbuat dalam rutinitas, 4) Dorongan dari pemimpin komunitas yang tidak mau melepaskan kekuasaan, karena pemberdayaan

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui(Tukasno)

adalah pelepasan sebagian kewenangan yang diserahkan kepada masyarakat, 5) Batas pemberdayaan, terkait dengan siklus pemberdayaan yang membutuhkan waktu relatif lama, 6) Kepercayaan pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi anggota komunitasnya, 7) Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat, dan 8) Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya (*resource*) yang besar baik biaya maupun waktu.

Pengembangan Kapasitas

Pengembangan Masyarakat. Pengembangan masyarakat harus menjadi proses yang dimiliki, dikuasai dan dilangsungkan oleh masyarakat karena mereka sendirilah yang mengerti akan kebutuhan, potensi, dan sumber daya yang mereka miliki. Untuk itu, pengembangan kapasitas dalam upaya mengembangkan masyarakat juga harus dilakukan pada tataran yang sama, yaitu pada tataran sistem, komunitas, kelembagaan dan individu. *Peningkatan kapasitas pada tataran sistem* meliputi usaha yang luas dan menekankan keterlibatan pemerintah dan pemegang kekuasaan lain untuk mengembangkan sistem pembangunan yang berpihak pada masyarakat. *Dalam lingkup komunitas*, proses peningkatan kapasitas adalah pada tataran kelembagaan komunitas dan individu. *Peningkatan kapasitas kelembagaan*, usaha meningkatkan peran dan tata kelembagaan yang mampu mewadahi gagasan, usulan dan aspirasi masyarakat untuk kemajuan komunitasnya. Peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi: usaha penyadaran masyarakat untuk menyusun norma-norma dan aturan-aturan yang menyangkut pola perilaku masyarakat dan terbentuknya lembaga-lembaga berbasis komunitas untuk pembangunan di lingkungannya, usaha meningkatkan kemampuan manajerial dan berorganisasi masyarakat untuk mewujudkan tata kelembagaan

yang partisipatif dan transparan. *Peningkatan kapasitas individu* meliputi: usaha meningkatkan kemampuan individu masyarakat agar mampu memanfaatkan potensi dan kemampuan dirinya untuk kemajuan masyarakat, usaha-usaha pembelajaran dari ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan. Proses pengembangan masyarakat berupa siklus yang terus menerus dan berkelanjutan, karena kondisi dan dinamika masyarakat terus berkembang.

Elemen-elemen dalam Pengembangan Kapasitas. Garlick dalam Mc Ginty (2003) menyebutkan lima elemen dalam pengembangan kapasitas yaitu: 1) Membangun pengetahuan, meningkatkan keterampilan, mewadahi penelitian dan pengembangan, serta bantuan belajar, 2) Kepemimpinan, 3) Membangun jaringan, kerjasama dan aliansi, 4) Menghargai dan mengajak komunitas bersama-sama mencapai tujuan, dan 5) Dukungan informasi, mengumpulkan, mengakses dan mengelola informasi.

Evaluasi Pemberdayaan. *United Nation Development Programme* (2002): “mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan selektif yang mencoba mengkaji perkembangan dan pencapaian suatu hasil secara sistematis dan objektif”. Evaluasi tidak hanya dilakukan satu kali namun berulang dan dilaksanakan berdasarkan lingkup yang berbeda pada beberapa tahapan waktu untuk menilai capaian pengetahuan dan pembelajaran dalam upaya mencapai hasil (*outcome*). “Evaluasi pemberdayaan sebagai evaluasi yang mengarah pada upaya peningkatan pencapaian keberhasilan program pemberdayaan yang lebih baik (Wandersman dalam Fetterman, 2007). Menurut Fetterman (2007): “Evaluasi pemberdayaan adalah proses mendapatkan gambaran diri melalui evaluasi dan refleksi diri dalam tataran individu atau grup guna meningkatkan kualitas diri melalui inisiatifnya sendiri”.

Terdapat beberapa pendekatan dan model evaluasi pemberdayaan. Guijt (2000) menjelaskan bahwa: "Evaluasi pemberdayaan harus dilakukan sendiri oleh masyarakat melalui rangkaian kegiatan partisipatif (*participatory monitoring & evaluation*= PM&E). Prinsip dalam PM&E adalah bahwa masyarakat lokal berperan sebagai partisipan aktif, semua stakeholder ikut mengevaluasi sedangkan pihak luar hanya memfasilitasi, fokus pada pengembangan kapasitas stakeholder dan proses yang ada ditujukan untuk membangun komitmen guna kemajuan dan tindakan korektif". Pendekatan evaluasi pemberdayaan lainnya adalah evaluasi konvensional. Menurut Riebergen-McCracken (1998), evaluasi tradisional cenderung bersifat linear dan lebih berfungsi untuk menilai akuntabilitas manajemen dan keuangan sedangkan evaluasi partisipatif lebih bersifat *open-ended* dan *iterative* (berulang) dan lebih berfungsi untuk menjawab kebutuhan terhadap perubahan dalam kegiatan. Kritik Cousins (2005) terhadap teori evaluasi pemberdayaan Fetterman adalah bahwa tindakan evaluasi bisa dilihat dari dua sisi yaitu evaluasi yang dilakukan oleh praktisi yang bersifat praktis dan evaluasi yang dilakukan oleh peneliti yang cenderung teoritis.

Prinsip Evaluasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas. Konsep evaluasi pemberdayaan menurut Fetterman dan Wandersman (2007) lebih mengarah pada evaluasi faktor-faktor eksplisit daripada faktor implisit. Fetterman menyampaikan 10 prinsip-prinsip dalam evaluasi pemberdayaan yaitu: 1) *Improvement* (peningkatan), 2) *Community ownership* (kepemilikan komunitas), 3) *Inclusion* (inklusi), 4) *Democratic participation* (partisipasi demokrasi), 5) *Social justice* (keadilan sosial), 6) *Community knowledge* (pengetahuan komunitas), 7) *Evidence-based strategies* (strategi berbasis alasan), 8) *Capacity building* (pengembangan kapasitas), 9) *Organizational*

learning (pembelajaran organisasi), dan 10) *Accountability* (akuntabilitas).

Untuk mengevaluasi kinerja pengembangan kapasitas, *United Nation Development Program* (2008) memaparkan kerangka kerja/*framework* yang merupakan dimensi penilaian yang terdiri dari: masukan (*points of entry*), isu utama (*core issues*), dan kapasitas fungsional/teknis (*technical /functional capacities*). Dimensi masukan (*points of entry*) dibedakan berdasarkan tingkatannya yaitu pengembangan kapasitas dalam level sistem, kelembagaan dan individu. Dimensi isu utama (*core issues*) merupakan pengembangan kapasitas yang terdiri dari penataan kelembagaan (*institutional arrangement*), kepemimpinan (*leadership*), pengetahuan (*knowledge*), dan akuntabilitas (*accountability*). Dimensi kapasitas fungsional merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas manajerial yang dibutuhkan untuk menyusun, mengimplementasikan dan mereview kebijakan, strategi, program dan kegiatan. Kapasitas teknis merupakan upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Model Evaluasi Pemberdayaan Fujikake. Model evaluasi Fujikake adalah alat analisis untuk mengukur derajat keberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mencoba memahami pencapaian pemberdayaan dari pandangan masyarakat sebagai pelaksana program. Ada empat tahap dalam evaluasi pemberdayaan (Fujikake, 2008) yaitu: *Tahap pertama*, melihat perubahan tingkat kesadaran masyarakat. Hasil analisis perubahan tingkat kesadaran dituangkan dalam grafik yang diklasifikasikan menjadi 3 tipe yaitu "sangat baik", "telah berubah", dan "tidak seperti sebelumnya" (Gambar 3). *Tahap kedua*, menilai pemberdayaan berdasarkan 12 indikator yaitu: tingkat partisipasi, pengemukaan opini, perubahan kesadaran, pengambilan tindakan, kepedulian dan kerjasama, kreativitas, menyusun tujuan baru,

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui(Tukasno)

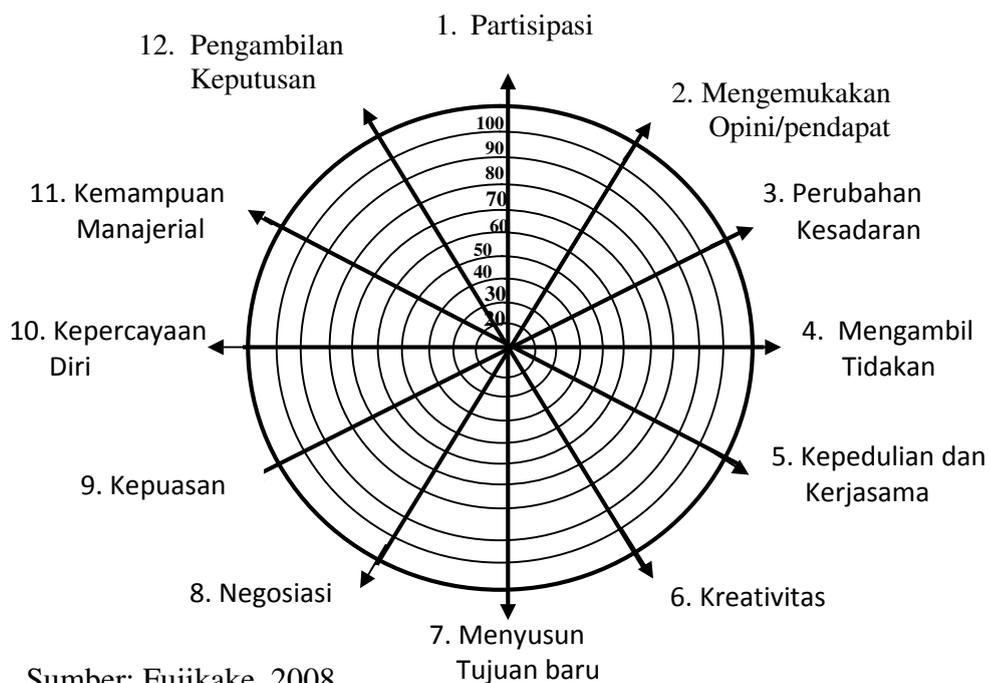
negosiasi, kepuasan, kepercayaan diri, keterampilan manajerial, dan pengambilan keputusan (Gambar 4). *Tahap ketiga*, mengelompokkan dan menghubungkan indikator yang telah dianalisis sebelumnya. Hasil analisis adalah grafik keterkaitan antar elemen ekonomi, sosial dan budaya, kesadaran dan mobilitas (Gambar 5). *Tahap*

keempat, mengukur tingkat pencapaian, apakah pada tataran lokal, regional atau nasional. Fujikake menggolongkan tingkat pemberdayaan menjadi tiga yaitu: *micro level* (desa), *meso level* (kota), dan *macro level* (nasional). Hasil analisis adalah grafik tingkat pemberdayaan (Gambar 6).



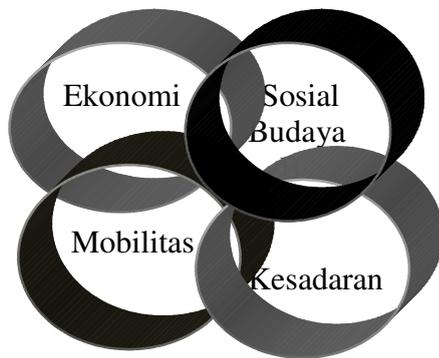
Sumber: Fujikake, 2008

Gambar 3. Tiga Tipe Hasil Pemberdayaan



Sumber: Fujikake, 2008

Gambar 4. Evaluasi Pemberdayaan dengan 12 Indikator



Sumber: Fujikake, 2008

Gambar 5. Empat Elemen Pemberdayaan



Sumber: Fujikake, 2008

Gambar 6. Tingkatan Pemberdayaan

Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah terciptanya masyarakat yang berdaya dan mampu menjalin sinergi dengan pemerintah daerah serta kelompok peduli setempat dalam rangka menanggulangi kemiskinan secara efektif, mandiri dan berkelanjutan. Misi PNPM-MP adalah memberdayakan masyarakat perdesaan, terutama masyarakat miskin, untuk menjalin kerjasama sinergis dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli lokal dalam upaya penanggulangan kemiskinan, melalui pengembangan kapasitas, penyediaan sumber daya, dan melembagakan budaya kemitraan antar pelaku pembangunan. Pengembangan kapasitas merupakan salah satu aspek dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan menanggulangi kemiskinan.

Tujuan PNPM-MP adalah: 1) Mewujudkan masyarakat “Berdaya” dan “Mandiri” yang mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan di wilayahnya, sejalan dengan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, 2) Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menerapkan model pembangunan partisipatif yang berbasis kemitraan dengan masyarakat dan kelompok peduli setempat, 3) Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan untuk optimalisasi penanggulangan kemiskinan, dan 4) Meningkatkan capaian manfaat bagi masyarakat miskin untuk mendorong peningkatan IPM dan pencapaian sasaran MDGs. Sasaran pelaksanaan PNPM-MP adalah: 1) Terbangunnya lembaga kepemimpinan masyarakat (BKM) yang aspiratif, representatif, dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat, 2) Tersedianya PJM

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui(Tukasno)

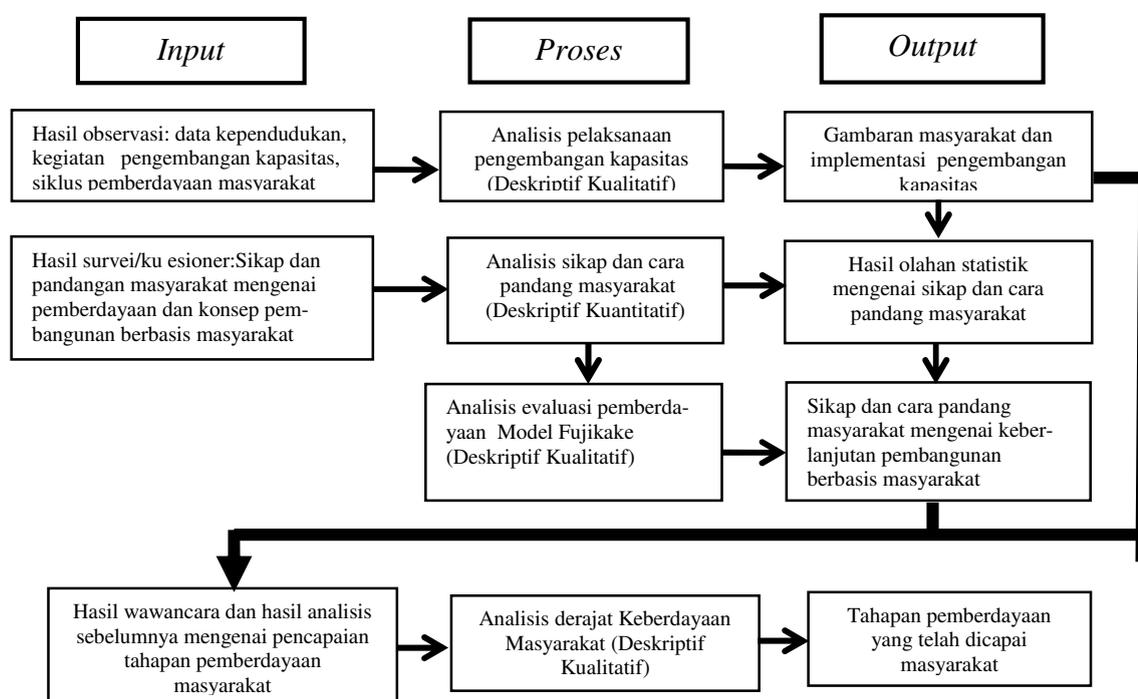
Pronangkis sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan, 3) Meningkatkan akses pelayanan kebutuhan dasar warga miskin dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran MDGs.

Pendekatan untuk mencapai tujuan PNPM-MP adalah: 1) Melembagakan pola pembangunan partisipatif berorientasi pada masyarakat miskin dan berkeadilan, Membangun lembaga kepemimpinan masyarakat (BKM) yang representatif, akuntabel, dan mampu menyuarakan kepentingan masyarakat, 2) Menyediakan stimulan BKM secara transparan untuk mendanai kegiatan penanggulangan kemiskinan dan membuka lapangan

kerja melalui pembangunan sarana/prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi lokal, memperkuat keberlanjutan program, menumbuhkan rasa memiliki di kalangan masyarakat melalui proses penyadaran, partisipatif, pengelolaan hasil dan lainnya, 3) Meningkatkan kemampuan perangkat pemerintah dalam perencanaan, penganggaran, dan pengembangan paska program, 4) Meningkatkan efektifitas perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada masyarakat miskin dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis yang merupakan konsep langkah-langkah penelitian yang meliputi *input*, proses, dan *output* penelitian(Gambar 7).



Gambar 7. Kerangka Analisis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu analisis yang memberikan gambaran menyeluruh terhadap gejala/peristiwa/kondisi suatu objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah: 1) Wawancara, dilakukan terhadap beberapa penduduk yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai proses pengembangan kapasitas dalam program pemberdayaan yang telah dilaksanakan, 2) Observasi, teknik ini membantu peneliti dalam memahami pola kehidupan masyarakat di lokasi penelitian, dan 3) Kuesioner, digunakan untuk mendapatkan data mengenai sikap dan cara pandang masyarakat tentang konsep pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan proses pembangunan berbasis masyarakat di wilayahnya. Jawaban hasil kuesioner diberi skor dengan menggunakan skala *likert*.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas, dan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2009). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah sikap dan cara pandang masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat melalui PNPM-Mandiri Pedesaan yang meliputi aspek-aspek: 1) partisipasi, 2) mengemukakan pendapat, 3) perubahan kesadaran, 4) kemampuan bertindak, 5) kerjasama dan kepedulian, 6) kreativitas, 7) menyusun tujuan baru, 8) negosiasi, 9) kepuasan, 10) kepercayaan diri, 11) kemampuan manajerial, 12) pengambilan keputusan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jenis partisipasi atau peran responden dalam pemberdayaan yang meliputi peran responden dalam pemberdayaan masyarakat yang dibedakan menjadi peran dalam kepengurusan Badan

Keswadayaan Masyarakat (BKM), Unit Pelaksana (UP), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan atau masyarakat sebagai relawan.

Metode Analisis. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Metode kuantitatif dengan menggunakan perhitungan statistika sederhana, mengukur sebaran data, menghitung varian dan standar deviasi serta teknik pengontrolan data menggunakan teknik perhitungan *cross-tabulation*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas

Kegiatan pengembangan kapasitas dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi-sosialisasi, pelatihan-pelatihan (*coaching*) dan pelaksanaan siklus pemberdayaan. Hasil analisis kegiatan pengembangan kapasitas dalam program pemberdayaan masyarakat dijelaskan sebagai berikut.

Sosialisasi Program Pemberdayaan. Sosialisasi awal program ini mendapatkan tanggapan yang cukup baik dari masyarakat, karena masyarakat merasa senang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah dimana pengelolaan dan pelaksanaannya akan dilakukan sendiri oleh masyarakat. Rangkaian kegiatan sosialisasi berikutnya adalah Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), yaitu menghimpun masyarakat untuk memutuskan menerima atau menolak program pemberdayaan masyarakat PNPM-MPd di desanya dan berfungsi sebagai pembelajaran awal bagi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-MPd. Pada tahapan ini masyarakat memasuki tahap awal siklus pemberdayaan masyarakat, yaitu masyarakat telah memiliki keinginan untuk berubah. Pada tahap ini telah berhasil menghimpun

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui(Tukasno)

relawan yang akan menjadi *pioneer* di tingkat desa dalam rangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat. Relawan yang terbentuk dalam satu kecamatan (10 desa) berjumlah 240 orang terdiri dari 170 orang laki-laki (70,83%) dan 10 orang perempuan (29,17%). Ditinjau dari aspek gender, keterwakilan perempuan cukup representatif karena dalam ketentuan PNPM-Mandiri Pedesaan Tahun 2007 dipersyaratkan keterlibatan perempuan minimal 20%. Sosialisasi selanjutnya adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan melalui siklus pemberdayaan dalam program PNPM-Mandiri Perdesaan.

Pelatihan Masyarakat/Coaching. Pelatihan di PNPM-Mandiri Pedesaan pada dasarnya adalah pelatihan motivasional yaitu pelatihan yang mendorong peserta mempunyai paradigma dan sikap mental positif yang mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Pelatihan secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu yang terkait dengan siklus dan non siklus. Pelatihan yang terkait dengan siklus yaitu *coaching* refleksi kemiskinan, pelatihan dasar relawan, peme-taan swadaya, penyusunan PJM Pronangkis, pelatihan praturgas BKM, pelatihan BKM, pelatihan dasar, pelatihan madya, pelatihan utama dan pelatihan lain yang mendukung siklus pemberdayaan. Pelatihan yang tidak terkait dengan siklus yaitu pelatihan pembuatan media warga, pelatihan manajemen penanggulangan bencana berbasis masyarakat, pelatihan pengembangan data dan informasi komunitas, pelatihan UPK, UPS, UPL, pelatihan Kades, dan pelatihan-pelatihan/OJT keterampilan teknis lainnya.

Sikap dan Cara Pandang Masyarakat.

Dalam penelitian ini dilakukan upaya untuk mengetahui bagaimana sikap dan cara

pandang masyarakat terhadap aspek-aspek pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi. Tingkat partisipasi masyarakat menghadiri pertemuan yang dilaksanakan PNPM-MP tergolong tinggi. Rincian frekuensi yang hadir dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Skor	Frekuensi	Prosentase
1	5	7,35
2	6	8,82
3	17	25,00
4	27	39,71
5	13	19,12
Jmlh	68	100

Tabel 4 menunjukkan sebanyak 39,71% responden menyatakan sering datang menghadiri pertemuan; 19,12% pasti datang; 25,00% jarang datang; 8,82% sesekali datang; dan 7,35% menyatakan tidak pernah datang.

Kemauan Masyarakat. Tingkat kemauan masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan PNPM MP tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Tingkat Kemauan Masyarakat

Skor	Frekuensi	Prosentase
1	8	11,76
2	5	7,35
3	18	26,47
4	20	29,41
5	17	25,00
Jmlh	68	100

Hasil kuesioner menyatakan bahwa masyarakat mau berpartisipasi hanya pada pembangunan fisik di lingkungannya, sedangkan yang jauh dari lingkungannya atau beda dukuh kemauannya kurang. Dari Tabel 5 menunjukkan sebanyak 29,41% responden menyatakan sering ikut dalam kegiatan

pembangunan fisik; 25,00% pasti ikut, 26,47% jarang ikut, 7,35% jarang sekali ikut dan 11,76% menyatakan tidak pernah ikut.

Kepedulian dan Kerjasama. Tingkat kepedulian dan kerjasama masyarakat terhadap warga miskin dalam PNPM-MP tergolong sedang sebagaimana terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Tingkat Kepedulian dan Kerjasama

Skor	Frekuensi	Prosentase
1	9	13,24
2	12	17,65
3	19	27,94
4	16	23,53
5	12	17,65
Jumlah	68	100

Sebanyak 27,94% responden menyatakan kurang peduli terhadap warga miskin; 23,53% cukup peduli, 17,65% pasti peduli, 17,65% kurang sekali peduli; dan 13,24% menyatakan tidak pernah peduli terhadap warga miskin.

Kerja Kelompok. Tingkat kerja kelompok masyarakat dalam kegiatan PNPM MP tergolong sedang sebagaimana terlihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Tingkat Kerja Kelompok

Skor	Frekuensi	Prosentse
1	7	10,29
2	9	13,24
3	24	35,29
4	20	29,41
5	8	11,76
Jumlah	68	100

Sebanyak 35,29% responden menyatakan jarang kerja berkelompok; 29,41% sering kerja berkelompok; 11,76% selalu kerja berkelompok; 13,24% jarang sekali; dan 10,29% tidak pernah kerja berkelompok.

Pengambilan Tindakan. Tingkat mengambil tindakan masyarakat dalam kegiatan pemba-

ngunan dalam tergolong tinggi sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Tingkat Pengambilan Tindakan

Skor	Frekuensi	Prosentase
1	5	7,35
2	6	8,82
3	15	22,06
4	26	38,23
5	16	23,53
Jmlh	68	100

Sebanyak 38,23% responden menyatakan tergerak mengambil tindakan dalam pembangunan; 23,53% sangat tergerak; 22,06% cukup tergerak; 8,82% kurang tergerak; dan 7,35% menyatakan tidak tergerak mengambil tindakan dalam pembangunan.

Penyampaian Opini. Tingkat penyampaian opini masyarakat dalam pembicaraan dan pembahasan pembangunan tergolong sedang sebagaimana terdilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Tingkat Penyampaian Opini

Skor	Frekuensi	Prosentase
1	15	22,06
2	9	13,24
3	19	27,94
4	15	22,06
5	10	14,71
Jmlh	68	100

Sebanyak 27,94% responden menyatakan jarang membicarakan kegiatan pembangunan di luar forum pertemuan; 22,06% sering; 14,71% sering sekali; 13,24% jarang sekali; dan 22,06% tidak pernah membicarakan.

Mengemukakan Pendapat. Tingkat keberanian masyarakat mengemukakan pendapat dalam pertemuan-pertemuan tergolong sedang sebagaimana terlihat pada Tabel 10.

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui(Tukasno)

Tabel 10. Tingkat Mengemukakan Pendapat

Skor	Frekuensi	Prosentase
1	10	14,71
2	11	16,18
3	17	25,00
4	15	22,06
5	15	22,06
Jmlh	68	100

Sebanyak 25,00% responden menyatakan jarang mengemukakan pendapat dalam kegiatan PNPM; 22,06% sering mengemukakan pendapat; 22,06% selalu mengemukakan pendapat; 16,18% jarang sekali dan 14,71% tidak pernah mengemukakan pendapat.

Perubahan Kesadaran. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap akar permasalahan kemiskinan dalam komunitasnya tergolong tinggi, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Tingkat Perubahan Kesadaran

Skor	Frekuensi	Prosentase
1	6	8,82
2	6	8,82
3	16	23,53
4	23	33,82
5	17	25,00
Jmlh	68	100

Tingkat kesadaran ini hasil dari pengembangan kapasitas terutama saat siklus-siklus awal seperti refleksi kemiskinan dan peme-taan swadaya. Sebanyak 33,82% responden menyatakan cukup menyadari akar setiap masalah kemiskinan dalam komunitasnya; 25,00% sangat menyadari; 23,53% kurang menyadari; 8,82% kurang sekali menyadari; dan 8,82% tidak menyadari akar masalah kemiskinan dalam komunitasnya.

Kreativitas. Tingkat kreativitas masyarakat dalam bentuk pemunculan ide-ide baru tergolong sedang, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 12. Tingkat Kreativitas Ide Baru

Skor	Frekuensi	Prosentase
1	4	5,88
2	6	8,82
3	25	36,76
4	22	32,35
5	11	16,18
Jmlh	68	100

Dalam hal ini masyarakat kreatif menyam-paikan ide-ide untuk pembangunan desanya seperti penataan sistem irigasi. Sebanyak 36,76% responden menyatakan kurang memiliki ide-ide baru; 32,53% sering memberikan ide-ide baru; 16,18% sering sekali; 8,82% jarang; dan 5,88% tidak pernah memberikan ide-ide baru.

Pemecahan Masalah. Tingkat kemampuan masyarakat dalam pemecahan masalah tergolong sedang, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Kemampuan Memecahkan Masalah

Skor	Frekuensi	Prosentase
1	10	14,71
2	8	11,76
3	20	29,41
4	16	23,53
5	14	20,59
Jmlh	68	100

Sebanyak 29,41% responden menyatakan jarang mamikirkan memecahkan masalah kemiskinan dalam komunitasnya; 23,53% sering, 20,59% selalu; 11,76% jarang sekali memikirkan; dan 14,71% tidak pernah memikirkan.

Penyusunan Tujuan Baru. Tingkat kapa-sitas masyarakat menyusun tujuan baru dalam membangun dengan konsep baru tergolong tinggi, sebagaimana terlihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Penyusunan Tujuan Baru

Skor	Frekuensi	Prosentase
1	7	10,29
2	9	13,24
3	18	26,47
4	19	27,94
5	15	22,06
Jmlh	68	100

Sebanyak 27,94% responden menyatakan sering memikirkan membangun kampungnya menjadi bentuk yang baru; 22,06% selalu; 26,47% kurang; 13,24% jarang sekali; dan 10,29% tidak pernah.

Negosiasi. Tingkat negosiasi masyarakat dalam penyampaian program tergolong tinggi, sebagaimana terlihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Tingkat Negosiasi Program

Skor	Frekuensi	Prosentase
1	9	13,24
2	10	14,71
3	14	20,59
4	20	29,41
5	15	22,06
Jmlh	68	100

Masyarakat dapat menegosiasikan program yang direncanakan (prioritas pavingisasi jalan agar merata di seluruh desa). Sebanyak 29,41% responden menyatakan sering melakukan negosiasi dalam menyampaikan program; 22,06% pasti bernegosiasi; 20,59% jarang bernegosiasi; 14,71% jarang sekali bernegosiasi; dan 13,24% tidak pernah bernegosiasi.

Kepuasan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil kegiatan yang dilaksanakan tergolong tinggi, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 16. Sebanyak 44,12% responden menyatakan puas; 16,18% sangat puas; 20,59% cukup puas; 13,24% kurang puas; dan 5,88% tidak puas terhadap hasil kegiatan.

Tabel 16. Tingkat Kepuasan

Skor	Frekuensi	Prosentase
1	4	5,88
2	9	13,24
3	14	20,59
4	30	44,12
5	11	16,18
Jmlh	68	100

Pemanfaatan Dana. Tingkat pemanfaatan dana pembangunan tergolong tinggi (lihat Tabel 17) pemanfaatan dana pengaspalan dan pavingisasi jalan lebih transparan dikelola masyarakat melalui KSM. Sebanyak 44,12% responden menyatakan pemanfaatan dana baik sekali; 16,18% sangat baik sekali; 25,00% cukup baik; dan 8,82% kurang baik; dan 5,88% tidak baik.

Tabel 17. Tingkat Pemanfaatan Dana

Skor	Frekuensi	Prosentase
1	4	5,88
2	6	8,82
3	17	25,00
4	30	44,12
5	11	16,18
Jmlh	68	100

Keterampilan Manajerial. Tingkat keterampilan manajerial masyarakat tergolong sedang (lihat Tabel 18).

Tabel 18. Tingkat Keterampilan Manajerial

Skor	Frekuensi	Prosentase
1	5	7,35
2	10	14,71
3	23	33,82
4	20	29,41
5	10	14,71
Jmlh	68	100

Sebanyak 33,82% responden menyatakan biasa saja dalam administrasi; 29,41% lebih paham mengelola administrasi surat menyurat dan notulensi; 14,71% terampil

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui(Tukasno)

administrasi; 14,71% kurang memahami; dan 7,35% tidak memahami.

Kepercayaan Diri. Tingkat kepercayaan diri masyarakat tergolong tinggi (Tabel 19).

Tabel 19. Tingkat Kepercayaan Diri

Skor	Frekuensi	Prosentase
1	7	10,29
2	6	8,82
3	18	26,47
4	22	32,35
5	15	22,06
Jmlh	68	100

Masyarakat lebih percaya diri dalam forum pertemuan dan berani memimpin forum. Sebanyak 32,35% responden menyatakan sangat percaya diri; 22,06% sangat percaya diri sekali; 26,47% cukup percaya diri; 8,82% kurang percaya diri; dan 10,29% tidak percaya diri.

Pengambilan Keputusan. Tingkat keberanian masyarakat dalam pengambilan keputusan tergolong tinggi (lihat Tabel 20).

Tabel 20. Pengambilan Keputusan

Skor	Frekuensi	Prosentase
1	7	10,29
2	10	14,71
3	11	16,18
4	25	36,76
5	15	22,06
Jmlh	68	100

Sebanyak 36,76% responden menyatakan sangat berani; 22,06% sangat berani sekali; 16,18% cukup berani; 14,71% kurang berani; dan 10,29% tidak berani.

Analisis Tanggapan Masyarakat

Analisis tanggapan masyarakat merupakan analisis dari nilai rata-rata jawaban. Tanggapan masyarakat tergolong tinggi, dengan nilai rata-rata 3,39 (lihat Tabel21).

Tabel 21. Nilai Rata-rata Jawaban Setiap Pertanyaan

No.	Indikator Pertanyaan	Nilai Rata-rata
1	Tingkat partisipasi masyarakat	3,60
2	Tingkat kemauan masyarakat	3,47
3	Kepedulian dan kerjasama masyarakat	3,18
4	Kerja kelompok masyarakat	3,22
5	Pengambilan tindakan	3,60
6	Penyampaian opini	2,97
7	Penyampaian pendapat/usulan	3,12
8	Perubahan kesadaran	3,60
9	Kreativitas	3,44
10	Pemecahan masalah	3,27
11	Penyusunan tujuan baru	3,426
12	Negosiasi program	3,27
13	Kepuasan hasil kegiatan	3,52
14	Kepuasan pemanfaatan dana	3,60
15	Ketrampilan manajerial	3,44
16	Kepercayaan diri	3,47
17	Pengambilan Keputusan	3,50
Nilai Rata-rata		3,39

Analisis Evaluasi Pemberdayaan

Dalam evaluasi pemberdayaan ini yang dianalisis lebih mengarah pada *outcome* atau hasil dari kegiatan pemberdayaan yang selama ini telah dilaksanakan daripada *output* atau keluarannya secara langsung. *Outcome* yang dimaksud terdiri dari perubahan kesadaran masyarakat, lingkup kegiatan pemberdayaan, dan tingkatan pemberdayaan masyarakat yang terjadi dalam kegiatan PNPM MPd di Kecamatan Pekalongan. Perubahan kesadaran masyarakat lebih merupakan dampak dari serangkaian kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat yang secara terus menerus dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan agenda pemberdayaan masyarakat yang lain. Analisis mengenai dampak dari pengembangan kapasitas ini tidak bisa dihitung berdasarkan peningkatan jumlah atau angka partisipasi, kuantitas finansial, maupun kuantitas fisik terbangun serta indikator-indikator fisik lainnya, tetapi lebih kepada pencapaian sasaran akhir program yang dapat diukur salah satunya dari peningkatan efektivitas dan efisiensi program yang dijalankan. Untuk itu tingkat perubahan kesadaran ini dapat dianalisis dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap kondisinya saat ini. Berdasarkan jawaban pertanyaan tentang perubahan kesadaran masyarakat nilai rata-rata 3,603 dari skala 5,000 (Tabel 21) mengisyaratkan bahwa telah terjadi perubahan kesadaran masyarakat yang lebih baik/tinggi dalam arti terjadi tumbuhnya motivasi untuk melakukan perubahan menjadi kondisi yang lebih baik serta pengakuan terhadap hasil kegiatan yang telah mereka laksanakan sendiri. Tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Pekalongan terhadap masalah kemiskinan dan pembangunan di lingkungannya cukup tinggi. Kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap anggota komunitasnya didorong oleh serangkaian kegiatan pengembangan kapasitas yang selama ini dilaksanakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif serta pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Rangkaian pengembangan kapasitas dalam PNPM-MPd yang terdiri dari kegiatan sosialisasi, pelaksanaan siklus, dan pelatihan telah dijalankan dengan baik, dengan menggunakan pendekatan sosio-kultural yaitu dengan memperhatikan aspek keagamaan, aspek gender dan kebiasaan sehari-hari masyarakat. 2) Sikap dan cara pandang masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tergolong baik atau tinggi. Sikap dan cara pandang masyarakat tersebut secara umum tidak dipengaruhi oleh golongan usia, tingkat pendidikan dan perannya dalam PNPM namun lebih banyak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Kualitas keterlibatan, peran dan tanggapan kaum perempuan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masih lebih rendah dibanding dengan kaum laki-laki meskipun secara kuantitas tingkat partisipasinya bisa dikatakan telah mencukupi. 3) Temuan evaluatif menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan telah sesuai dengan tahapan pemberdayaan yang telah ditentukan dalam PNPM-MPd maupun dalam literatur tentang pemberdayaan masyarakat. Sedangkan temuan evaluatif terhadap hasil menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang telah berjalan selama 10 tahun telah berhasil mengubah tingkat kesadaran masyarakat dan meningkatkan pemahaman untuk turut serta berperan dalam pembangunan di komunitasnya, namun untuk mencapai tingkat kemandirian dan derajat keberdayaan yang sesungguhnya masih diperlukan pembelajaran lebih lanjut yang harus dilakukan secara kontinyu dan terpadu. 4) Pemberdayaan masyarakat melalui lingkungan, sosial dan ekonomi secara tidak langsung juga mendorong terlaksananya pemberdayaan politik. Melalui rangkaian

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui(Tukasno)

pengembangan kapasitas masyarakat bisa belajar mengenai kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen komunitas sehingga menjadikan mereka memiliki tanggung-jawab yang lebih besar dalam pembangunan dan memiliki posisi tawar yang lebih besar dalam hubungannya dengan pihak lain di luar komunitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pekerjaan Umum. 2008. *Pedoman Operasional Umum PNPM Mandiri Perdesaan 2008*.
- Fetterman, David and Wandersman, Abraham. 2007. Empowerment Evaluation: Yesterday, Today, and Tomorrow. *American Journal of Evaluation*. 2007; 28; 179.
- Fujikake, Yoko. 2008. Qualitative Evaluation: Evaluating People's Empowerment, Japanese. *Journal of Evaluation Studies*. Vol 8 No 2, 2008, pp 25 – 37, Japan Evaluation Society.
- Guijt, Irene. 2000. *Methodological Issues in Participation Monitoring and Evaluation, Learning From Change Issues and Experiences in Participatory Monitoring and Evaluation*. Canada: ITDG Publishing.
- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- UNDP. 2008. *Capacity Development Practice Notes*. New York: United Nation Development Programme.
- Wandersman, Abraham, et al. 2005. *The Principle of Empowerment Evaluation, Empowerment Evaluation: Principles in Practice*. New York: The Guilford Press.
- Wilson, Terry. 1996. *The Empowerment Manual*. London: Grower Publishing Company.

PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

UMUM

Artikel berupa kajian bidang Manajemen dan Bisnis baik artikel hasil penelitian maupun artikel konseptual yang belum pernah dipublikasikan atau tidak sedang dikirim ke jurnal lain. Naskah dikirim sebanyak dua eksemplar dan file naskah dalam DVD dengan microsoft office word 93-2007 disertai biodata penulis dalam lembar terpisah. Kepastian pemuatan akan diberitahu secara tertulis.

SISTEMATIKA PENULISAN

Artikel hasil penelitian terdiri atas: judul, nama dan alamat lembaga penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka.

Artikel konseptual terdiri atas: judul, nama dan alamat lembaga penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka.

Judul tidak boleh melebihi 14 kata (bahasa Indonesia) dan 12 kata (bahasa Inggris).

Nama Penulis ditulis lengkap tanpa gelar akademik disertai nama institusi tempat bekerja dan alamatnya.

Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris (cetak miring) kurang lebih 200 kata dalam satu paragraf yang berisi masalah dan permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan kesimpulan.

Kata Kunci mencerminkan konsep pokok artikel, jumlah antara 3-6 kata dalam bahasa Inggris.

Pendahuluan artikel hasil penelitian berisi: latar belakang, masalah, permasalahan, tujuan, kajian teoritis/kerangka pemikiran dan hipotesis. Artikel konseptual berisi: hal menarik yang menjadi acuan (konteks) permasalahan, diakhiri rumusan singkat hal pokok yang akan di bahas dan tujuan pembahasan.

Metode Penelitian berisi: desain penelitian, sasaran penelitian (populasi, sampel dan teknik sampling), sumber data, teknik pengumpulan data dan metode dan teknik analisis yang ditulis dengan format esei .

Hasil dan Pembahasan artikel hasil penelitian berisi: jawaban pertanyaan penelitian, proses mendapatkan, menginterpretasikan temuan, mengaitkan temuan dengan pengetahuan, memunculkan serta memodifikasi teori. Artikel konseptual berisi: kupasan, analisis, argumentasi, komparasi, keputusan serta pendirian atau sikap penulis tentang masalah yang dibahas.

Kesimpulan artikel hasil penelitian berisi: ringkasan dan pengembangan pokok-pokok pikiran berdasar temuan, pengembangan teori dan penelitian lanjutan. Artikel konseptual berisi: penegasan atas masalah yang telah dibahas sebelumnya dan beberapa alternatif penyelesaian.

Daftar Pustaka. Semua rujukan dimuat dalam daftar pustaka dan ditempatkan pada halaman terakhir menyatu dengan tubuh artikel.

FORMAT PENULISAN

Artikel diketik pada kertas A4 dengan spasi tunggal (1 spasi), tipe huruf *times new roman* 12, margin tepi atas kertas 1,4", tepi bawah 1,2", tepi kiri 1", dan tepi kanan 1", panjang artikel 15-25 halaman, ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan benar serta disajikan secara naratif dan tidak bersifat numerik.

Judul artikel ditulis dengan huruf *times new roman* 14 dengan huruf kapital, bold, diletakkan di tengah. **Judul bab**, huruf kapital ukuran 12, bold, diletakkan di tengah. Sub judul, huruf besar kecil, bold, diletakkan di tepi kiri. Sub-sub judul dengan huruf besar kecil cetak miring, bold, diletakkan di tepi kiri.

Daftar Pustaka disusun berdasarkan urutan abjad nama akhir. Jika nama lebih dari satu kata maka diawali dengan nama akhir koma diikuti nama awal. Contoh penulisan daftar pustaka:

Artikel dalam Buku:

Hasibuan, Malayu . 1997. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: CV Haji Masagung

Artikel dalam Buku Kumpulan Artikel:

Noviyani, Putri. 2002. Pengaruh Pengalaman dan Pelatihan terhadap Pengetahuan Auditor tentang Kekeliruan. *Simposium Nasional Akuntansi 5* (hlm.76-92). Semarang: IAI.

Artikel dalam Jurnal:

Wijayanto, Bayu. 2003. Efek Gangguan Permintaan dan Penawaran terhadap Fluktuasi Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.9 No.2 (September), hlm. 169-181.

Artikel dalam Majalah atau Koran:

Oktavia, Tiur S dan Santi, Joice T. 3 Juli, 2007. Bisnis Perbankan: Masyarakat Perlu Melek Investasi. *Kompas*, hlm. 21.

Artikel dalam Majalah/Koran Tanpa Penulis:

Lampung Post. 2007, 29 September. *Akses Modal Terbatas, UKM Gulung Tikar*. hlm. 21.

Dokumen Tanpa Pengarang dan Lembaga:

Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1990. Jakarta: PT Armas Duta.

Dokumen atas Nama Lembaga:

Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Karya Terjemahan:

Porter, Michael E. 1993. *Teknik Menganalisis Industri dan Bersaing*. Terjemahan oleh Agus Maulana. Jakarta: Erlangga.

Skripsi, Tesis atau Disertasi:

Alghifari, Abizar. 2008. *Analisis Kualitas Produk terhadap Kepuasan Konsumen CV.Retina Printing di Bandar Lampung*. Skripsi tidak diterbitkan. Bandar Lampung: FE-UBL.

Makalah Seminar, Penataran, atau Lokakarya:

Kadir, Samsir. 1996. *Mentalitas dan Etos Kerja*. Paper Seminar Nasional Strategi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 16-17 Juni.

Internet Karya Individual:

Purwanto, Andi T. 2004. *Manajemen Lingkungan: Dulu, Sekarang, dan Masa Depan*. (Online), (<http://andietri.tripod.com/index.htm>, diakses 14 Februari 2007).

Internet Artikel dari Jurnal

Kumaidi. 1998. Pengukuran Awal Belajar dan Pengembangan Tes. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Jilid 5 No.4. (Online), (<http://www.malang.ac.id>, diakses 20 Januari 2000).

Penyajian Tabel

Nomor tabel menggunakan angka arab, Nomor dan judul tabel ditempatkan diatas tabel dari tepi kiri tidak diakhiri titik. Judul lebih dari satu baris diberi jarak satu spasi. Tabel tidak menggunakan garis vertikal. Teks sebelum dan sesudah tabel diberi jarak 2 sd 3 spasi. Jika lebih dari satu halaman, bagian kepala tabel diulang pada halaman berikutnya.

Penyajian Gambar

Nomor gambar menggunakan angka arab. Nomor dan Judul ditempatkan dibawah gambar secara senter. Sumber kutipan ditulis di dalam kurung diletakan di bawah gambar. Teks sebelum dan sesudah gambar diberi jarak 2 sd 3 spasi.

ISSN 2087-0701



9 772087 070108